

IMPLEMENTASI KINERJA KEUANGAN, REALISASI BELANJA MODAL, DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET NEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Witang Pranestianegara^{1*}, Rida Perwita Sari²

*Email : witang.pranestia@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur¹

Abstract. *The Politeknik Pelayaran Surabaya is part of the Ministry of Transportation, a work unit under the Transportation Human Resources Development Agency of the Ministry of Transportation which is engaged in education and training specifically for seafarers and has the status of the Central Government Public Service Agency (BLU). This research was conducted to determine and measure the extent to which financial performance, capital expenditure realization and state asset management were implemented in the presentation of the financial statements of the Politeknik Pelayaran Surabaya for the 2019 fiscal year. A qualitative descriptive approach was used in this research through case studies or field studies and literature studies. Based on the research results, it is known that the financial reports of the Politeknik Pelayaran Surabaya have shown good results and information on financial performance, realization of capital expenditures and management of state assets have been adequately presented based on Government Accounting Standards (SAP). However, for the management of state assets, it is necessary to develop and optimize their use in order to increase revenue so that it will encourage increased services to the community, for example by conducting KSP (Utilization Cooperation) or KPBU (Government Cooperation with Business Entities).*

Keywords: *Financial Performance, Realization of Capital Expenditures, State Asset Management, Quality of Financial Statements.*

Abstrak. Politeknik Pelayaran Surabaya merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan yakni satuan kerja yang berada dibawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pelatihan khusus Pelaut dan telah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) Pemerintah Pusat. Riset ini dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana kinerja keuangan, realisasi belanja modal dan pengelolaan manajemen aset negara diimplementasikan dalam penyajian laporan keuangan Politeknik Pelayaran Surabaya tahun anggaran 2019. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan pada riset ini melalui studi kasus atau studi lapangan serta studi literatur. Berdasarkan hasil riset diketahui bahwa laporan keuangan Politeknik Pelayaran Surabaya sudah menunjukkan hasil yang baik dan informasi kinerja keuangan, realisasi belanja modal dan pengelolaan manajemen aset negara sudah disajikan secara memadai berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun untuk manajemen aset negara perlu dilakukan pengembangan dan dioptimalkan penggunaannya guna meningkatkan pendapatan sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat misalnya dengan melakukan KSP (Kerjasama Pemanfaatan) ataupun dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Realisasi Belanja Modal, Pengelolaan Manajemen Aset Negara, Kualitas Laporan Keuangan.

Pendahuluan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik atas penggunaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Pemerintah pusat wajib menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan pemerintahan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan lain yang telah ditentukan. Laporan keuangan tersebut mencerminkan kinerja organisasi sektor publik selama satu periode akuntansi yang umumnya meliputi 4 komponen laporan yang harus disajikan yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat yang dapat dipergunakan sebagai referensi dalam menilai kinerja pemerintah. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6, dikatakan bahwa “Pengelolaan keuangan dikuasakan kepada Menteri Keuangan yang berperan sebagai pelaksana dan pengelola fiskal serta sebagai Wakil Pemerintah dalam hal kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam penyusunan anggaran, pelaporan keuangan hingga membuat kebijakan-kebijakan fiskal (berkaitan dengan pajak) guna menstabilkan keuangan negara”.

Berbeda dengan sektor privat, sektor publik dapat menyelenggarakan kegiatan operasionalnya apabila dana telah tersedia sehingga organisasi sektor publik dikenal dengan organisasi non profit yakni organisasi yang tidak mencari keuntungan atau lebih kepada memberi pelayanan kepada masyarakat. Namun, seiring dengan tuntutan perkembangan jaman dan teknologi yang memotivasi organisasi publik untuk mengembangkan sayapnya ke praktik bisnis lain dengan memberikan pelayanan terbaik kepada publik dalam penyediaan barang dan jasa dan lebih mandiri dalam pembiayaan kegiatan operasionalnya. Pernyataan tersebut didukung oleh keluarnya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pasal 1 yang intinya menyatakan bahwa tujuan Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) adalah supaya pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat tanpa mencari *profit* dalam penyediaan barang dan/atau jasa, dimana kegiatan atau operasionalnya lebih menekankan kepada pelaksanaan prinsip efektif, efisiensi dan produktivitas.

Dewasa ini sudah banyak instansi pemerintah yang diarahkan ke sistem BLU yang tujuannya adalah percepatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat supaya tepat sasaran dengan harapan bahwa BLU menjadi contoh konkrit dalam reformasi organisasi publik terkait pengimplementasian manajemen keuangan berbasis hasil/kinerja. Dimana isu yang diangkat pada reformasi ini adalah perbaikan pengelolaan sumber daya publik yang efektif dan efisien dalam pemanfaatannya sebagai implementasi dari *new public management* yang mengacu pada aspek *value for money* untuk mencapai kinerja yang optimal, efektif, ekonomis dan juga efisien.

Politeknik Pelayaran Surabaya adalah bagian dari Kementerian Perhubungan yakni satuan kerja yang berada dibawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pelatihan khusus Pelaut dan telah berstatus BLU (Badan Layanan Umum) dimana laporan keuangan dibuat dan disusun mengikuti PSAP 13 (Pemerintahan, 2009) dan PMK No.220/PMK.05/2016 serta PMK. No.225/PMK.05/2016 serta disampaikan secara berjenjang dari bawah (tingkat UAKPA/B) ke atas hingga tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Laporan Keuangan Pemerintah yang disajikan berasal dari sistem yang terintegrasi antara aplikasi persediaan-aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA. Aplikasi SAIBA menerima kiriman laporan keuangan dari aplikasi SAS (sistem akuntansi satker) yang terhubung dengan layanan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sedangkan untuk laporan aset berasal dari kiriman aplikasi SIMAK BMN yang terhubung dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang). Dengan penggunaan sistem terintegrasi dan terpusat ini mengurangi tingkat kesalahan manusia seperti kesalahan input atau kesalahan mata anggaran karena selalu dilakukan sinkronisasi data secara berkala dan berjenjang hingga tingkat K/L. Rekonsiliasi belanja dan pendapatan dilakukan setiap bulan dengan tujuan agar laporan kinerja instansi dapat dipantau dalam rangka penyerapan anggaran negara serta dilakukannya pelaporan keuangan setiap semester secara berjenjang dari UAKPA/B (kuasa pengguna anggaran/barang) ke UAPA/B (pengguna anggaran/barang).

Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai satuan kerja BLU yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan (diklat) pelaut dituntut secara mandiri dalam menghimpun dan mengelola anggaran pendapatan dan belanjanya supaya masyarakat dapat menerima pelayanan terbaik dari instansi ini. DIPA Poltekel Surabaya menginformasikan bahwa sebagian anggaran belanja masih ditopang dana APBN Rupiah Murni (RM) khususnya untuk pembayaran biaya gaji dan biaya pemeliharaan rutin aset tetap, sedangkan untuk belanja modal sudah menggunakan APBN (BLU). Sebagai satker BLU, Politeknik Pelayaran Surabaya mempunyai 2 fungsi yakni (1) sebagai entitas pelaporan satker BLU harus menyusun 7 komponen laporan keuangan (2) sebagai entitas akuntansi wajib menyusun 4 komponen laporan keuangan. Laporan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca. Sedangkan 3 laporan tambahan yang disampaikan untuk melengkapi 4 laporan sebelumnya yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan disertai SoR (*Statement of Reviu*) dari Satuan Pemeriksa Internal (SPI) yang berperan sebagai auditor internal organisasi sektor publik.

Di dalam laporan keuangan satker Politeknik Pelayaran Surabaya, disajikan pula laporan aset yang diperoleh dari realisasi belanja modal dan perolehan lain yang sah hingga membentuk aset dan dikelola untuk kegiatan operasional dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Aset memiliki peran dan porsi yang besar dalam penyajian laporan keuangan yang mana pengelolaan manajemen aset menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan (Tangke et al., 2015). Didukung hasil penelitian Nilliani (Nilliani, 2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh implementasi manajemen aset. Yang artinya bahwa manajemen aset mempunyai dampak yang besar terhadap laporan keuangan, apabila pengelolaan manajemen aset dilakukan dengan benar dan tepat dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan maka informasi nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan akan mencerminkan nilai yang riil dan akurat sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan manajerial dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, apabila pengelolaan manajemen aset tidak dilakukan dengan benar dan tepat menyimpang dari ketentuan, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak dapat dipercaya kebenarannya sehingga selain akan menimbulkan dampak saat pengelolaan dilapangan juga akan mempengaruhi opini audit baik audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal maupun audit eksternal dari auditor eksternal (KAP) dan BPK.

Realisasi belanja modal mempunyai pengaruh terhadap nilai aset yang tercatat di neraca laporan aset maupun laporan keuangan dan menunjukkan arah yang sama yaitu kenaikan belanja modal akan menambah jumlah aset atau dapat mengkapitalisasi nilai aset. Sehingga aset khususnya aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting dibandingkan komponen neraca lainnya karena aset tetap mempunyai nilai yang cukup signifikan, misalnya tanah (Halim & Kusufi, 2014). Didukung oleh hasil penelitian Sisdianto & Nengsih (2017) yang berpendapat bahwa realisasi belanja modal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal berupa aset tetap mempunyai kapasitas tinggi

di dalam laporan keuangan karena nilainya lebih besar daripada akun yang lain. Oleh karena itu, informasi atas mutasi atas aset tetap akibat transaksi penambahan atau pengurangan aset yang diperoleh dari realisasi belanja modal harus diungkapkan secara lengkap dan rinci dalam catatan atas laporan keuangan untuk meminimalisasi kesalahan persepsi (salah tafsir) oleh pengguna laporan tersebut. Selain itu, kinerja keuangan yang diinterpretasikan dalam laporan keuangan dapat dipergunakan sebagai acuan manajemen untuk mengambil keputusan baik taktis maupun strategis guna peningkatan kinerja keuangan di periode mendatang.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI REALISASI BELANJA MODAL, PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET NEGARA, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Lapangan pada Politeknik Pelayaran Surabaya)”**. Penelitian akan dilakukan dengan studi lapangan dan studi literatur pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pelatihan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan sistem untuk mengukur hasil transaksi bisnis dan meringkas hasil transaksi tersebut ke dalam suatu bentuk laporan yang dapat dipahami oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan (Hanafi & Halim, 2005:9). Didukung oleh pernyataan Horrison Jr (2012:3) yang mendefinisikan Akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang dipergunakan untuk menilai transaksi bisnis dengan pemrosesan data hingga menjadi laporan serta disampaikan kepada manajemen guna proses pengambilan keputusan terkait transaksi bisnis. Jika dikaitkan dengan sektor publik, maka entitas akuntansinya adalah organisasi sektor publik yang menunjuk pada organisasi pemerintahan pusat ataupun daerah dalam menentukan pos-pos aktivitas dan anggaran dananya yang berguna dalam proses manajerial dan pertanggungjawaban terkait proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran (Halim & Kusufi, 2014:15). Selain itu, akuntansi sektor publik dikenal sebagai akuntansi dana karena khusus dan fokus dalam penghimpunan sumber dana yang akan dialokasikan atau dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga dana (anggaran) tersebut disebut sebagai *focal point* yakni sebagai landasan operasional organisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik umumnya di bidang Pemerintahan adalah sebuah alat informasi sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara kepada publik yang penyusunan dan penyajiannya didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Akuntansi mencerminkan akuntabilitas, keterbukaan dan prediktabilitas atas kinerja organisasi publik yang dipergunakan oleh Pemerintah sebagai manajemen untuk alat informasi yang akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan pencapaian hasil dari pelaporan keuangan yang dibuat oleh organisasi yang didasarkan pada standar keuangan yang ditetapkan. Menurut Lidyawati (2019) yang mendefinisikan bahwa laporan keuangan mencerminkan hasil prestasi atas kinerja keuangan yang telah diraih atau dicapai, yang dapat dilihat pada posisi neraca dan laba/rugi dalam periode akuntansi. Kinerja keuangan pemerintah mencerminkan tingkat keberhasilan atau pencapaian prestasi kerja di bidang keuangan atas pelaksanaan pengelolaan anggaran selama satu periode anggaran yang disusun menggunakan sistem

keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan pemerintah yang berasal dari perhitungan APBN/D dalam sistem laporan pertanggungjawaban.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik berfungsi sebagai indikator dalam menilai capaian suatu strategi yang dilakukan oleh manajer dengan menetapkan pengukuran keuangan maupun nonkeuangan sebagai tolok ukur kinerja (Halim & Kusufi, 2014:124). Karena ruang lingkup sektor publik lebih luas dan multidimensional, selain bidang keuangan juga menggunakan bidang nonkeuangan untuk mengukur kinerja (Mardiasmo, 2009). Program pengukuran kinerja yang dicanangkan dalam bidang keuangan menggunakan konsep *value for money* (VFM) yaitu mencakup pengukuran ekonomi, efektifitas, dan efisiensi (3E) dalam pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan organisasi (Halim & Kusufi, 2014:128). Dengan demikian, kinerja dianggap sebagai ukuran (tolak ukur) dalam pelaksanaan kegiatan operasional guna pengembangan organisasi/instansinya di masa mendatang.

3. Realisasi Belanja Modal

Anggaran mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kegiatan/program dalam organisasi sektor publik, karena dengan adanya anggaran kegiatan operasional dapat terlaksana. Anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan operasional guna pencapaian tujuan organisasi. Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mendefinisikan “Anggaran sebagai pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”. Anggaran ini yang selanjutnya akan direalisasikan menjadi belanja dan/atau pendapatan sesuai dengan klasifikasinya dalam RBA yang sudah disusun. Setiap anggaran selalu mempunyai pos-pos aktivitas sendiri sehingga akan memudahkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan anggaran tersebut. DIPA APBN/D menyajikan dana yang tersedia dalam satuan moneter yang akan dicapai atau dialokasikan dalam bentuk belanja dalam periode waktu tertentu berdasarkan data masa lalu sebagai pembanding guna mempermudah pengelolaan, pengendalian (kontrol) dan penilaian kinerja pada periode berjalan (Halim & Kusufi, 2014:48).

“Belanja Modal merupakan perolehan aset tetap atau aset lainnya yang berasal dari dana atau biaya yang sudah dianggarkan dalam perencanaan awal dimana perolehan aset tersebut dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi” menurut Halim (Halim & Kusufi, 2012:107) sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Dijabarkan kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran dengan menekankan pada batas minimal nilai aset yang dapat dikapitalisasi sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah apabila memenuhi syarat dibawah ini:

1. Pertambahan aset dan/atau pertambahan masa manfaat/umur ekonomis aset.
2. Pertambahan kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
3. Memenuhi syarat nilai minimum kapitalisasi, yaitu:
 - Pengadaan peralatan dan mesin, mencapai harga sebesar Rp300.000,-/unit.
 - Pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan mencapai harga sebesar Rp10.000.000,-/paket pekerjaan
4. Barang yang diperoleh/dibeli tidak untuk diserahkan/dijual/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi belanja modal adalah pengurangan anggaran sesuai dengan pos dan peruntukannya yang telah

ditetapkan dalam perencanaan anggaran (RBA) dalam perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 bulan dan dapat dikapitalisasi sesuai ketetapan atau kebijakan pemerintah. Apabila belanja modal meningkat menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh pemerintah juga banyak sehingga nilai aset akan mempengaruhi nilai laporan keuangan serta mempengaruhi kinerja keuangan organisasi publik secara langsung. Karena fungsi dan peranan aset adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Manajemen Aset Negara

PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011 mendefinisikan aset sebagai sumber daya atau sumber kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. IFRS (*International Financial Reporting Standards*) mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu yang memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa mendatang. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Aset adalah manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan sebagai akibat dari aktivitas masa lalu,
2. Aset dimiliki, dikuasai dan dikendalikan oleh perusahaan,
3. Aset dapat berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai masa ekonomis lebih dari satu periode atau lebih dari 12 bulan.

Aset yang diperoleh dengan menggunakan anggaran dana dari APBN/D disebut sebagai barang milik negara/daerah (aset negara) dimana manajemen atau pengelolaannya telah ditetapkan oleh Undang-undang dan selalu dilakukan pengawasan dan pengendalian langsung oleh Pemerintah melalui Pengelola Barang yaitu Menteri Keuangan. Menurut Pardiman dan Nuha (2009) yang menyatakan bahwa perubahan paradigma baru dalam bidang pengelolaan barang milik negara/aset negara dimulai saat dikeluarkannya PP Nomor 38 Tahun 2008 turunan dari peraturan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memicu tumbuhnya optimisme untuk melakukan perbaikan dalam penataan dan pengelolaan aset negara menjadi lebih tertib, akuntabel, dan transparan di periode yang akan datang. Dengan perubahan mindset tersebut mendorong perubahan perilaku dari *asset administrator* menjadi *asset manager*. Dengan demikian, kedepannya pengelolaan manajemen aset dapat dilakukan lebih efektif dan lebih efisien dalam rangka peningkatan kinerja tata kelola aset negara maupun daerah (Setiyono et al., 2018).

“Visi pengelolaan aset negara kedepan adalah menjadi *the best state asset management on the world*. Mulai beralih dari petugas teknis administratif menjadi layaknya seorang manajer aset yang dituntut harus mampu merumuskan dan merencanakan kebutuhan barang milik negara secara nasional dengan akurat dan pasti berdasarkan kebutuhan organisasi, serta dapat meningkatkan manfaat dan nilai dari aset negara tersebut” menurut Pardiman dan Nuha (2009) dalam tulisannya dilaman artikel DJKN. Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN), Encep Sudarwan, dalam seminar "Pengelolaan Aset untuk Negeri" (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>) menyatakan bahwa tantangan dalam pengelolaan aset negara saat ini adalah mewujudkan 3 hal, yaitu:

- 1) Aset mampu menjadi sumber pendapatan negara (*revenue center*);
- 2) Aset membantu mengurangi dan menekan beban belanja negara (*cost saving*); dan
- 3) Aset mampu menjadi sumber pembiayaan investasi pemerintah.

Oleh karena itu, satuan kerja Kementerian/Lembaga diarahkan ke sistem BLU dengan harapan dapat memberikan pelayanan terbaik, cepat dan tepat dan mandiri dalam hal

pengelolaan keuangan sehingga dapat membantu menambah surplus APBN/D dalam percepatan pembangunan.

5. Kualitas Laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi dalam pengelolaan keuangan atas pelaksanaan dana operasional selama satu periode anggaran yang dinyatakan dalam satuan moneter. Berbeda dengan tujuan penyusunan laporan keuangan pada sektor swasta yang digunakan untuk mengukur laba, penyusunan laporan keuangan pada sektor publik mempunyai tujuan *Government Accounting Standard Board*, (2009:54) antara lain:

- 1) Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi,
- 2) Sebagai laporan atas hasil kegiatan operasi,
- 3) Sebagai laporan atas kondisi keuangan perusahaan,
- 4) Sebagai laporan atas sumber daya (aset berwujud/tidak berwujud) jangka panjang.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah “ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Karakteristik yang harus dipenuhi supaya kualitas laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat, antara lain:

1. Relevan

Informasi laporan keuangan yang disajikan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, saat ini serta untuk prediksi kejadian masa depan. Informasi dikatakan relevan apabila:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
- c. Tepat waktu.
- d. Lengkap.

2. Andal

Informasi bebas dari bias yang menyesatkan dan bebas dari kesalahan material serta menyajikan setiap fakta yang jujur yang dapat diverifikasi. Informasi dikatakan andal apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Jujur dalam penyajian.
- b. Dapat dibuktikan (*verification*).
- c. Netralitas (tidak berpihak).

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang disajikan dapat diperbandingkan antara periode sebelumnya dengan periode saat ini secara internal maupun eksternal dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain dengan syarat penggunaan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mudah ditafsirkan dan dipahami oleh pengguna laporan maupun pihak lain yang berkepentingan.

Laporan keuangan pemerintah sebagai entitas akuntansi dan sebagai satker BLU harus disusun berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh PMK No.225/PMK 05/2016 (basis kas) yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas (LAK);
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sedangkan menurut PSAP 13 menurut IAI (2009) serta PMK. No.220/PMK.05/2016, Satker Pemerintah yang berstatus BLU (berbasis akrual) wajib menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Arus Kas (LAK)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

PENELITIAN TERDAHULU

Sisdianto & Nengsih (2017) melakukan riset dengan judul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Realisasi Belanja Modal, dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu). Riset tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah Kinerja Keuangan, Realisasi Belanja Modal dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah melalui LKPD dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan pengambilan data menggunakan metode analisis (*skala likert*). Dari riset tersebut diperoleh hasil bahwa kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh kinerja keuangan sedangkan variabel realisasi belanja modal dan pengelolaan manajemen aset daerah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Persamaan riset yang dilakukan oleh Sisdianto & Nengsih (2017) dengan penelitian ini adalah pada pemilihan variabel independennya yaitu meliputi kinerja keuangan, realisasi belanja modal dan pengelolaan manajemen aset daerah serta kualitas laporan keuangan dipilih dan dipergunakan sebagai variabel dependen. Perbedaannya adalah subyek pada riset sebelumnya adalah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sedangkan riset ini menggunakan objek pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya. Selain itu metode yang digunakan dalam riset sebelumnya adalah metode kuantitatif, sedangkan metode kualitatif deskriptif digunakan dalam riset ini.

Metode Penelitian

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber datanya adalah laporan keuangan *audited* tahun 2019 dan diinterpretasikan dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kasus atau studi lapangan ke subyek penelitian secara langsung. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba dalam Pujosuwarno (1992:34) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan *case study* ataupun *qualitative*, yaitu penelitian yang dilakukan secara detail, terperinci dan mendalam atas segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek penelitian yang diamati. Riset ini berfokus pada satu obyek tertentu untuk diamati dan dipelajari sebagai suatu kasus sehingga dapat dianalisis secara cermat dan tepat berdasarkan fenomena yang terjadi hingga mendapatkan hasil kesimpulan. Dengan kata lain, data studi kasus dapat diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan objek penelitian (Hadari, 2003:1).

Riset ini mengambil objek kinerja keuangan, realisasi belanja modal dan manajemen aset negara yang diimplementasikan dalam penyajian laporan keuangan. Sedangkan subjeknya adalah Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya Tahun Anggaran 2019.

Riset ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi ataupun studi literatur sedangkan sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Sumber data primer

berupa hasil pertanyaan wawancara, sedangkan sumber data sekunder berupa laporan keuangan audited tahun 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kinerja Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kinerja keuangan diperoleh dari Laporan Ralisasi Anggaran Politeknik Pelayaran Surabaya tahun anggaran 2019 yaitu jumlah penerimaan dan realisasi penerimaan serta belanja negara baik target maupun realisasinya. Pendapatan dan beban selama periode berjalan disajikan laporan operasional seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
 Laporan Realisasi Anggaran
 Tahun Anggaran 2019 (*Audited*)

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		% thd	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	109.318.630.000	114.877.295.102	105,08%	90.420.748.216
Jumlah Pendapatan Negara & Hibah	109.318.630.000	114.877.295.102	105,08%	90.420.748.216
B. Belanja Negara				
1. Belanja Pegawai	7.444.791.000	7.209.745.493	96,84%	7.134.939.427
2. Belanja Barang	177.896.470.000	176.346.865.016	99,13%	148.001.693.149
3. Belanja Modal	21.200.947.000	21.175.500.730	99,88%	25.623.535.090
4. Belanja Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja	206.542.208.000	204.732.111.239	99,12%	180.760.167.666
SURPLUS/(DEFISIT)	-	89.854.816.137	-	90.339.419.450
SILPA/(SIKPA)	-	89.854.816.137	-	90.339.419.450

Source: Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Pelayaran Surabaya TA 2019

Dilihat dari tabel 1 diatas, Politeknik Pelayaran Surabaya mengalami kenaikan realisasi penerimaan PNBPN sebesar Rp.114.877.295.102,- yakni mencapai 105% dari estimasi pendapatan Rp.109.318.630.000,-. Sedangkan realisasi belanja negara mengalami penurunan dari estimasi belanja, namun daya serap terhadap penggunaan anggaran mendekati 100% yang artinya kinerja laporan keuangan sesuai dengan perencanaan organisasi.

Tabel 2
Laporan Operasional
Tahun Anggaran 2019 (*Audited*)

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Alokasi APBN	74,009,357,143	54,447,695,724
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	104,480,647,388	70,425,948,372
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	-	-
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	5,693,809,500	3,863,718,847
Pendapatan BLU Lainnya	6,638,614,232	6,280,712,931
Jumlah Pendapatan	190,822,428,263	135,018,075,874
BEBAN		
Belanja Pegawai	58,665,975,868	54,171,472,076
Belanja Persediaan	10,303,239,419	1,873,437,674
Belanja Barang dan Jasa	77,078,585,449	66,122,286,374
Belanja Pemeliharaan	22,730,497,149	21,100,814,590
Belanja Perjalanan Dinas	15,167,376,654	13,369,118,308
Belanja Penyusutan dan Amortisasi	178,509,431,947	57,180,266,772
Belanja Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2,336,735	-24,993,941
Jumlah Beban	362,457,443,221	213,792,401,853
SURPLUS (DEFISIT)	- 171,635,014,958	- 78,774,325,979

Source: Laporan Operasional Politeknik Pelayaran Surabaya TA 2019

Dilihat dari tabel 2 diatas, Jumlah pendapatan mengalami kenaikan selama satu periode akuntansi senilai Rp. 190.822.428.263,-. Berikutnya untuk mengetahui kinerja keuangan Politeknik Pelayaran Surabaya terhadap kualitas laporan keuangan dapat dihitung menggunakan rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Rasio kemandirian digunakan untuk mengetahui kemampuan Badan Layanan Umum dalam membiayai kegiatan pelayanan, pemerintah dan pembangunan. Rumus rasio kemandirian menurut Lidyawati (2019) yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\% \\ &= \frac{190.822.428.263}{114.877.295.102} \times 100\% = \mathbf{166\%} \end{aligned}$$

Tabel 3 Rasio Kemandirian

Kemampuan Kemandirian	Prosentase Kemandirian
Mandiri	≥ 100%
Kurang Mandiri	< 100%

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dalam Lidyawati (2019)

Berdasarkan hasil rasio kemandirian, BLU Politeknik Pelayaran Surabaya menunjukkan rasio 166% yang artinya adalah Politeknik Pelayaran Surabaya mampu secara mandiri membiayai kegiatan pelayanan, pemerintah dan pembangunan. Hasil riset ini didukung dengan hasil penelitian Linda Lidyawati (2019) yang berpendapat bahwa

Badan Layanan Umum sangat mandiri untuk melakukan pembiayaan kegiatan operasionalnya sehingga kualitas laporan keuangannya juga lebih baik.

- b. Rasio Efisiensi menjelaskan besarnya realisasi biaya dibandingkan dengan realisasi penerimaan yang diterima yang dapat diukur dengan formula perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\% \\ &= \frac{204.732.111.239}{114.877.295.102} \times 100\% = \mathbf{178\%} \end{aligned}$$

Tabel 4 Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Prosentase Efisiensi
Efisien	≤ 100%
Kurang Efisien	> 100%

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dalam Lidyawati (2019)

Berdasarkan hasil rasio efisiensi diatas, diperoleh hasil 178% yang artinya adalah Politeknik Pelayaran Surabaya kurang efisien dalam menggunakan anggaran yang tersedia dalam pembiayaan belanja kegiatan operasional selama satu periode, karena realisasi belanja lebih tinggi dari realisasi penerimaan. Hal ini disebabkan karena sebagai satuan kerja yang berstatus BLU masih menggunakan dana APBN khususnya untuk membiayai belanja pegawai dan belanja pemeliharaan sehingga diperoleh prosentase diatas 100%.

- c. Rasio Efektivitas menjelaskan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi atau program kegiatan yang dijalankan. Untuk menganalisis tingkat efektivitas menggunakan formula perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\% \\ &= \frac{114.877.295.102}{109.318.630.000} \times 100\% = \mathbf{105\%} \end{aligned}$$

Tabel 5 Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Prosentase Efektivitas
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90-100
Cukup Efektif	> 80-90
Kurang Efektif	> 60-80
Tidak Efektif	≤ 60

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dalam Lidyawati, (2019)

Berdasarkan hasil rasio efektivitas diatas, diperoleh hasil 105% yang artinya adalah Politeknik Pelayaran Surabaya sangat efektif dalam penggunaan anggaran yang tersedia

disesuaikan dengan perencanaan awal per pos aktivitas. Semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang semakin baik sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan juga akan semakin baik.

2. Implementasi Realisasi Belanja Modal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Analisis realisasi belanja modal dapat dihitung dengan 2 cara, yaitu membandingkan jumlah belanja modal dengan jumlah total belanja atau membandingkan realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan. Berikut analisis realisasi belanja modal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan:

a. Jumlah belanja modal dibandingkan dengan jumlah total belanja

Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh jumlah belanja modal selama periode TA 2019 senilai 10% dari total belanja negara. Yang artinya bahwa 10% dari Rp. 204.732.111.239 yaitu Rp. 21.175.500.730 telah direalisasikan untuk memperoleh aset atau BMN. Dan prosentase realisasi terhadap target belanja modal sebesar 99,88% yang artinya anggaran belanja modal telah direalisasikan menjadi aset disesuaikan dengan anggaran dana yang tersedia.

b. Realisasi pengeluaran (biaya) dibandingkan dengan realisasi pendapatan

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pengeluaran biaya lebih banyak sebesar Rp. 362.457.443.221,- daripada realisasi pendapatan sebesar Rp. 190.822.428.263,- sehingga mengalami defisit anggaran sebesar – (Rp.171.635.014.958,-). Hal ini disebabkan karena sebagian belanja negara dibebankan pada dana APBN seperti beban pegawai, beban pemeliharaan, dan beban perjadi sehingga mengakibatkan nilai dari total belanja lebih besar dari pendapatan.

3. Implementasi Pengelolaan Manajemen Aset Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Indikator yang dipergunakan untuk menganalisis pengelolaan manajemen aset adalah menggunakan rasio perputaran aset tetap (*fixed asset turnover*) dan imbalan atas aset tetap (*return of fixed asset*). Berikut perhitungan rasio pengelolaan manajemen aset negara berdasarkan Perdirjen No-21/PB/2015 (Kementerian Keuangan, 2015) tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Pendidikan disajikan dalam rumus sebagai berikut:

Tabel 6
 NERACA
 Tahun Anggaran 2019 (*Audited*)

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	111.869.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	323.041.500	62.706.611.838
Kas pada Badan Layanan Umum	46.735.273.195	-
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	-	-
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	467.347.000	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	2.336.735	-
Persediaan	1.108.510.728	1.355.618.593
Persediaan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah Aset Lancar	48.631.835.688	64.174.099.431
ASET TETAP		
Tanah	1.217.516.259.000	1.426.046.652.000
Peralatan dan Mesin	401.755.069.775	383.743.975.499
Gedung dan Bangunan	325.633.644.270	745.176.214.652
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	999.037.464.818	94.649.286.950
Aset Tetap Lainnya	7.054.964.357	6.963.107.357
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akuntansi Penyusutan	- 668.162.419.428	-311.582.429.005
Jumlah Aset Tetap	2.282.834.982.792	2.344.996.807.453
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	5.097.048.857	4.810.311.857
Aset Lain-lain	1.945.145.700	2.441.737.800
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	- 3.862.013.957	- 4.084.121.166
Jumlah Aset Lainnya	3.180.180.600	3.167.928.491
JUMLAH ASET	2.334.646.999.080	2.412.338.835.375
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Kepada Pihak Ketiga	326.920.300	623.799.900
Pendapatan Diterima di Muka	2.478.489.333	4.072.798.000
Uang Muka dari KPPN	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.805.409.633	4.696.597.900
JUMLAH KEWAJIBAN	2.805.409.633	4.696.597.900
EKUITAS		
Ekuitas	2.331.841.589.447	2.407.642.237.475
Jumlah Ekuitas	2.331.841.589.447	2.407.642.237.475
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.334.646.999.080	2.412.338.835.375

Source: Neraca Politeknik Pelayaran Surabaya TA 2019

- a. Rasio perputaran aset digunakan dalam pengukuran untuk mengetahui tingkat produktivitas dan efisiensi aset tetap dalam menghasilkan pendapatan.

$$\text{Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnover)} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset tetap}} \times 100\%$$

$$= \frac{116.813.071.120}{2.282.834.982.792} \times 100\% = 5\%$$

Rasio perputaran aset tetap pada Politeknik Pelayaran Surabaya adalah sebesar 5% dalam satu periode akuntansi atau tahun anggaran. Dengan rasio 5% skor rasio perputaran aset tetap berdasarkan Perdirjen PK BLU menunjukkan skor 0,3. Aset tetap pada Politeknik Pelayaran Surabaya diperoleh dengan menggunakan anggaran BLU (dibiayai secara mandiri oleh satker) tidak menggunakan dana APBN sehingga perolehannya disesuaikan dengan kebutuhan instansi/lembaga. Oleh karena itu hasil prosentase perhitungannya menunjukkan nilai yang rendah, nilai rendah belum tentu menunjukkan inefisiensi dalam penggunaan aset. Namun dalam kasus ini memang pengelolaan aset (BMN) kurang optimal dikaitkan dengan penggunaannya atau optimalisasi aset. Diketahui bahwa nilai aset tetap pada Neraca Politeknik Pelayaran Surabaya menunjukkan nilai yang sangat tinggi sehingga perlu dilakukan pengelolaan manajemen aset secara maksimal, misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan atau sewa aset kepada pihak ketiga sehingga dapat meningkatkan pendapatan BLU.

- b. Imbalan atas Aset Tetap menjelaskan perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keungan/kerugian (tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN), ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap (tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan).

$$\begin{aligned} \text{Imbalan atas Aset Tetap} &= \frac{\text{Surplus atau Defisit}}{\text{Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}} \times 100\% \\ &\quad \text{Aset tetap} \\ &= \frac{170.945.218.305}{2.282.834.982.792} \times 100\% = 7,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil rasio imbalan atas aset diatas diketahui bahwa manajemen secara mandiri telah mampu mengelola investasinya secara efektif dan produktif serta mencerminkan hasil pengembalian investasi yang baik terhadap dana BLU. Rasio imbalan atas aset tetap dinilai baik karena berada pada titik ROFA > 6 yang merupakan skor target BLU dengan skor 1,2.

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan secara rinci dan mendetail, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Politeknik Pelayaran Surabaya yang berstatus BLU dikatakan sudah baik dilihat dari rasio kemandirian, efisiensi dan efektivitas. Hasil analisis rasio-rasio tersebut menunjukkan bahwa Politeknik Pelayaran Surabaya telah mampu secara mandiri dalam melakukan pengelolaan anggaran dari masyarakat untuk masyarakat yang diberikan dalam wujud pelayanan prima kepada masyarakat/publik. Namun, disisi lain juga menunjukkan penggunaan anggaran yg kurang efisien khusus dalam pembiayaan belanja negara. Hal ini dikarenakan untuk belanja pegawai dan belanja pemeliharaan masih menggunakan dana APBN yang ditunjukkan oleh realisasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan dengan prosentase nilai yang lebih besar dibandingkan dengan belanja lain (dari total belanja negara) sehingga akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hasil riset ini berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh Sisdianto & Nengsih (2017) yang berpendapat bahwa kinerja

- keuangan mempunyai tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan obyek dan besaran anggaran yang diterima dan dikelola oleh masing-masing obyek yang diangkat.
2. Realisasi belanja modal Politeknik Pelayaran Surabaya mempunyai tingkat yang cukup baik dan cukup efektif dan efisien dilihat dari hasil analisis antara realisasi belanja modal dengan target belanja modal senilai 99,88% artinya belanja modal diperoleh sesuai dengan pagu atau target perencanaan belanja modal. Dilihat dari perbandingan dengan total belanja memiliki nilai 10% artinya belanja modal yang dipergunakan selama tahun anggaran 2019 sebesar 10% dari total belanja, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja modal lebih rendah dibanding dengan belanja pemeliharaan yang mencapai 86%. Hal ini mempengaruhi nilai pada laporan realisasi anggaran sehingga tentu berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Sedangkan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan menunjukkan bahwa terjadi defisit senilai –(Rp. 171.635.014.958,-) pada Laporan Operasional per 31 Desember 2019. Defisit ini disebabkan karena tingginya beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud sehingga secara administrasi menunjukkan defisit anggaran. Disamping itu juga besarnya biaya barang dan pemeliharaan yang menyebabkan LRA dan LO mencatat defisit. Pada kenyataannya meskipun satker Politeknik Pelayaran Surabaya sudah berstatus BLU, namun beberapa belanja masih diakomodir dengan dana APBN, karena Aset Politeknik Pelayaran Surabaya sangat besar sehingga dipandang belum mampu membiayai biaya pemeliharaan aset secara mandiri.
 3. Pengelolaan Manajemen Aset Negara pada Politeknik Pelayaran Surabaya menunjukkan prosentase rasio perputaran aset yang rendah yakni 5%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa manajemen aset negara belum dikelola secara optimal yang dapat dilihat dari nilai aset tetap pada Neraca Politeknik Pelayaran Surabaya yang menunjukkan nilai yang sangat tinggi sehingga perlu dilakukan pengelolaan manajemen aset secara maksimal, misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan atau sewa aset kepada pihak ketiga sehingga dapat meningkatkan pendapatan BLU. Pengelolaan Aset Negara tidaklah mudah sehingga perlu terus dilakukan pengawasan dan pengendalian baik dari Kementerian/Lembaga maupun dari Kementerian Keuangan (KPKNL dan DJKN) supaya dapat bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan negara yakni dengan melakukan optimalisasi aset berupa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Kerjasama Pemanfaatan (KSP). Nilai aset yang tinggi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, didukung oleh hasil penelitian Sisdianto & Nengsih (2017) yang menyatakan bahwa pengelolaan manajemen aset daerah mempunyai andil besar dalam menentukan kualitas laporan keuangan.

Keterbatasan Penelitian

Hasil riset ini tentu tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif karena dilakukan pada satu subyek penelitian dan terbatas pada laporan keuangan 2019 (*Audited*) saja sehingga belum dapat memastikan kenaikan/penurunan antar rasio keuangan.
2. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan pada riset ini adalah indikator kinerja BLUD yang seharusnya menggunakan indikator kinerja PK-BLU karena subyek penelitian adalah satker Pemerintah Pusat. Indikator kinerja dari PK-BLU sesuai dengan Perdirjen No PER-21/PB/2015 hanya dapat digunakan oleh satker BLU bidang Pendidikan. Karena yg diukur dan dianalisis adalah kinerja keuangan saja, maka indikator tersebut belum dapat dilakukan pada penelitian ini.

3. Karena Politeknik Pelayaran Surabaya adalah satker BLU Pemerintah Pusat dimana penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi dengan aplikasi dari Kementerian Keuangan sehingga kesalahan pencatatan dapat diantisipasi dan diminimalisir. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel yang lebih banyak dan dianalisis secara *time series* untuk mengetahui lebih jelas apakah sistem yang digunakan telah mengakomodir semua instansi Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan K/L yang lebih baik, lebih transparan dan akuntabel. penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan permasalahan mengenai pembukuan pada usaha mikro kecil dan menengah.

Daftar Pustaka

- Hadari, Nawawi. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif, Cetakan Keempat* (p. 1). Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. *Jakarta: Salemba Empat*, hlm 48.
- Halim, A., & Kusufi, S. M. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Empat). *Jakarta: Salemba Empat*, hlm 107.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2005). Analisis laporan keuangan, edisi kedua. *Yogyakarta: AMP YKPN*, hlm 9.
- Horrison Jr, W. T. (2012). Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1. *Jakarta: Erlangga*, p. 3.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Revisi 2011 Tentang Aset Tetap. *Aset Tetap, 16(16)*, 1–35.
- Kementerian Keuangan. (2008). PP Nomor 38 Tahun 2008. *PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH*, 1–27.
- Kementerian Keuangan. (2010). Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 21/PB/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan*. PER-21/PB/2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2004). UU No. 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*, 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2016). PMK Nomor 225 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat.
- Keuangan, K. (2003). UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Keuangan, K. (2012). PP No. 74 Tahun 2012. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Lidyawati, L. (2019). *Analisis Layanan Keuangan Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bekasi. 1*(April), 25–34.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta: Andi*.
- Nilliani, D. (2019). Implementasi Manajemen Aset, Sumber Daya Manusia Pengelola Aset, serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 04(02)*, 102–113.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2009). *Standart Akuntansi Pemerintahan No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU*.
- Pujosuwarno, S. (1992). Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta:*

Lemlit IKIP Yogyakarta, 34.

- Kementerian Keuangan RI. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran*.
- Kementerian Keuangan RI. (2016). *PMK No.220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*. www.jdih.kemenkeu.go.id 1.1
- Setiyono, N., Nurdin, D., & Kasim, Y. (2018). *Analisis Kinerja Barang Milik Negara Berupa Aset Tanah Dan Bangunan Pada Badan Layanan Umum Universitas Tadulako*. 75–86.
- Sisdianto, E., & Nengsih. (2017). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Realisasi Belanja Modal, Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu)*. 10(1), 48–67.
- Tangke, J. G., Halim, & Lucita, G. (2015). *Jurnal Administrasi Negara THE EFFECT OF THE OPTIMIZATION OF REGIONAL OWNED-ASSET*. 21(April), 1–5.